

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad., *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.

Balai Harta Peninggalan Semarang, *Buku Saku Balai Harta Peninggalan*, Semarang, 2023.

Butarbutar, Nurhaini E., *Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematika KUHPerdata dan Perkembangannya*, Cetakan Kesatu. Bandung, PT Refika Aditama, 2011.

Dwiyanto. A., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.

Hadjon. M. Philipus., *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke 11, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011.

Hardiyansyah., *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Gava Media, 2011.

Lembaga Administrasi Negara (LAN), *AKUNTABILITAS Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*, 2015.

Lukito, Penny, Kusumastuti., *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.

Manan. B., *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-CO, 1992.

Mardiasmo., *Akuntansi Sektor Publik*, edisi terbaru, Yogyakarta, Andi Yogyakarta, 2018.

Marzuki. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008.

Mertokusumo. S., *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Mukti Fajar N, Yulianto A., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.

Notoamidjojo., *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, Jakarta, BPK Agung Mulia, 1975.

Narbuko, Cholid & Achmadi, Abu., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2015.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin., *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986.

Prawirosentono, Suryadi., *Manajemen Sumberdaya Manusia: Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Menuju Organisasi, Kompetitif Dalam Perdagangan Bebas Dunia*, Yogyakarta, 1999.

Dominikus Rato., *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.

Sirajuddin., dkk, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi & Keterbukaan Informasi*, Malang, Setara Press, 2011.

Sudarsono., *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

Subekti. R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa, 2005.

Syahrani. R., *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, PT. Alumni, 2013.

_____, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ordonnantie Van 5 Oktober 1872, Stb 1872 No. 166 tentang Balai Harta Peninggalan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 27 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Meteri Hukum dan HAM No M.02-HT.05.10 Tahun 2005 Tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir dan harta peninggalan yang tidak terurus yang berada dalam pengurusan dan pengawasan Balai Harta Peninggalan.

Keputusan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU. 1-16 KU. 03.03 Tahun 2020 tentang Prosedur Teknis Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan.

C. Penetapan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Rembang Nomor: 10/Pen.Pdt.Eks/2014/PN Rbg Jo. Nomor: 7/Pdt.Eks/2013/PN Rbg Perihal Tergugat Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya.

Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 208/Pdt.P/2017/PN.Smg Perihal Penetapan *Boedel* Orang Tak Hadir Menjadi Milik Negara.

Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 320/Pdt.p/2023/PNSmg, Perihal Penetapan uang Pihak Ketiga.

D. Jurnal, Artikel, Karya Ilmiah (Skripsi, Tesis dan Disertasi), Makalah

Bidasari Anindya, “Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.1, No.2, (Desember 2016): 40-41.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, “Relevansi Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dan Pengampu Pengawas”, *Jurnal Hukum Justice*, Vol 1, No.1, (Maret 2023): 40-49.

Hapsari, Firda Fatmalla, “Kepastian Hukum Pengaturan Taksir Ulang Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Balai Harta Peninggalan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 361/Pdt.P/2014 PN.Sby)”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, 2019.

Juniardy Daniel, “Revitalisasi Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Selakau Wali Pengawas dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Harta Kekayaan Anak Belum Dewasa”, Tesis, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2017.

Natasha Shela, M. Taufik Rahman, “Pengurusan Penjualan Saham Sebagai Objek Harta Kekayaan dalam Boedel Afwezigheid”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4 No. 2, (Desember 2022): 220-228.

Simatupang Taufik H, “Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kemenkumham Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-undangan di Daerah”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 1, (Maret 2018): 1-19.

Simatupang Taufik H, “Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18, No.3, (September 2018): 397-414.

Zulfa, Idana S, “Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas Dalam Melindungi Harta Kekayaan Anak (Studi Di Kantor Balai Harta Peninggalan Medan)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022.

E. Internet

Balai Harta Peninggalan Semarang, 2023, “Layanan Publik”, <https://bhpsemarang.kemenkumham.go.id/> (diakses 22 September 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, “Tata Usaha”, <https://kbbi.web.id/tata+usaha> (diakses 14 Desember 2023).

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2023. “Pengurusan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)”, <https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-bhp/pengurusan-harta-kekayaan-yang-pemiliknya-dinyatakan-tidak-hadir-afwezigheid> , (diakses 21 September 2023).